

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah. *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 2008
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2006
- Bawengan, G.W.. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta : Pradnya Paramita. 1989
- Djuroto, Totok. *Manajemen Penerbitan Pers*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2010
- Makarao, Mohammad Taufik, dan Suharsil. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 2004
- Muhtadi, Asep. *Jurnalistik Pendekatan Teori dan Praktek*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung : PT Alumni. 2007
- Najih, Mokhammad, dan Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press. 2012
- Panggabean, S.H., M.S., Dr. H.P.. *Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung : PT Alumni. 2012
- Prakoso, Djoko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty. 1988
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1984
- *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti Seri Pemerataan Keadilan 10*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1983

- Rahman, Hadi. *Penegak Hukum Melek Pers*. Jakarta: Lbh Pers Saepul. 2009
- Soesilo, R.. *Saksi dan Bukti (Ilmu Bukti dalam Proses Perkara Pidana menurut KUHAP)*. Bogor: Politeia. 1984
- Sumadiria, Haris. *Hukum Dan Etika Media Massa*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2016
- Susanto, Edy. *Hukum Pers di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010
- Tanusubroto, Soewiyatno. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung: Armico

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara RI Tahun 1981, No. 76. Jakarta. 1981
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers*. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 166. Jakarta. 1999
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 4252. Jakarta. 2002
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 61. Jakarta. 2008
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 157. Jakarta. 2009

### **Jurnal dan Karya Ilmiah**

- Amdani, Yusi. "*Implikasi Penafsiran Undang-Undang Oleh Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*". Jurnal Mimbar Hukum, Volume 27, Nomor 2, 2015. 2015
- Febrianingsih, Nunuk. *Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik*. Jurnal Rechts Vinding Vol. 1 No. 1. 2012
- Hakim G. Nusantara, Abdul, Luhut Pangaribuan, dan Mas Achmad Santosa. *Studi Kasus Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Penerbit Djambatan. 1986

Hendrik Mezak, Meray. *Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*. Law Review Vol. V No. 3, Maret 2006. Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. 2006

Kamaliah, Khairunnisa. *Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda*. ejornal Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Vol. 3 No.3 . 2015

Vina Laoka Boru Sitorus, Diah, I Gede Artha, I Ketut Sudjana. *Proses Persidangan Penyiaran Secara Langsung (LIVE) Di Televisi Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia*. ejornal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 7 No. 4. 2018

### **Artikel Internet**

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. *KPI dan Dewan Pers Tidak Pernah Melarang Siaran Langsung Sidang Pengadilan*. diakses pada tanggal 07 Juli 2018. <http://www.kpi.go.id/index.php/id/siaran-pers/1492-kpi-dan-dewan-pers-tidak-pernah-melarang-siaran-langsung-sidang-pengadilan>

Situmorang, S.H. M.H., Mosgan, dkk. *“Penelitian Hukum tentang Pengaruh Praktir Courtroom Television Terhadap Independensi Peradilan”*, Badan Pembinaan Hukum nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013. diakses pada tanggal 07 Juli 2018. [http://www.bphn.go.id/data/documents/laphir\\_integrasi\\_cetak.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/laphir_integrasi_cetak.pdf)

Prahassacitta, Vidya. *Rubrik : Sidang Terbuka Untuk Umum Dan Siaran Langsung Televisi*. diakses pada tanggal 7 Februari 2018. <http://business-law.binus.ac.id/2016/08/26/sidang-terbuka-untuk-umum-dan-siaran-langsung-televisi/>. 2016

Purnamasari, Niken. *Sidang Ahok Dimulai, Hakim: Live Diizinkan Sepanjang Bukan Acara Pembuktian*. diakses pada tanggal 07 Juli 2018. <https://news.detik.com/berita/d-3369424/sidang-ahok-dimulai-hakim-live-diizinkan-sepanjang-bukan-acara-pembuktian>. 2016